

## ABSTRAK

Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan Covid-19 ini membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengeluarkan dana bantuan sosial sebesar 28,7 triliun untuk disalurkan ke Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Terkait dengan bantuan sosial tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kasus dugaan rasuah yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial JPB dan empat orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan covid-19.

Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian di atas, Skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap “Keadaan Tertentu” Dalam Hubungan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi”** penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan termasuk ke dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 pada masa Pandemi Covid 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Disebut penelitian yuridis normatif karena, membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan terhadap keadaan tertentu dalam UU Tipikor pada masa pandemi Covid-19 ini masih bersifat multi tafsir sehingga perlu ada pembaharuan secara normatif maupun pemaknaan dari penegak hukum untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional dalam penelitian ini mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap pandemi Covid-19 karena berdampak pada terganggunya aktivitas penyelenggaraan negara sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan terhadap penanggulangan Covid-19 yang dibahas dalam penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa tersebut adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi sebagaimana memenuhi rumusan pada Pasal 2 UU Tipikor, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

**Kata Kunci : Keadaan Tertentu dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

## ***ABSTRACT***

The increasing number of patients caused by Covid-19 has made the Indonesian Government issue various policies to be able to resolve Covid-19 cases, one of which is by providing social assistance to people in need. The government through the Ministry of Social Affairs has issued social assistance funds of 28.7 trillion to be channeled to the Family Hope Program (PKH), Basic Food Cards, and Cash Social Assistance (BST). In relation to the social assistance, the Corruption Eradication Commission (KPK) disclosed a case of alleged harassment allegedly carried out by the Minister of Social Affairs JPB and four other people related to social assistance in the context of handling COVID-19.

Starting from the descriptions in the background of the research above, the thesis entitled "Analysis of "Certain Circumstances" in Relation to the Covid-19 Pandemic Period in Indonesia Based on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption" the author can formulate the problem of this research as follows : "Are the criminal acts of corruption committed under certain conditions as regulated in Article 2 paragraph 2 during the Covid 19 Pandemic, Law Number 20 of 2001". In this study the author uses a normative juridical approach. It is called normative juridical research because it discusses the doctrines or principles in the science of law.

Based on the results of the research above, the following conclusions can be drawn: The policy towards certain conditions in the Anti-Corruption Law during the Covid-19 pandemic is still multi-interpretive so that there needs to be a normative renewal and meaning from law enforcement to apply Article 2 paragraph (2) of the Law. Corruption. Several policies issued by the Indonesian government regarding public health emergencies and national disasters in this study mean that the Indonesian government is paying serious attention to the Covid-19 pandemic because it has an impact on disrupting state administration activities, causing the country to be in an unstable state or in other words. under certain circumstances. Thus, several series of events and policies regarding the handling of Covid-19 discussed in this study may be used as a basis that at this time Indonesia has entered the State level under certain circumstances as regulated in the Elucidation of Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. The juridical consequence of this series of events is that someone who commits an act of corruption as stated in Article 2 of the Anti-Corruption Law, law enforcers can demand or impose a death penalty on the defendant.

**Keywords: Certain Circumstances and Law Number 20 Year 2001**